

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG MELALUI
ALOKASI DANA DESA DI KAMPUNG SINAREKOWA DISTRIK
WOUMA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Akademik Guna Mencapai
Gelara Sarjana S. Ap Pada Program Studi Administrasi Publik*



Oleh:

MARIKE MATUAN
NIM. 201811104

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNA'IM) YAPIS WAMENA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

2022

Halaman Persetujuan

Halaman pengesahan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Batasan masalah	3
C. Rumusan masalah.....	4
D. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	4
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Kajian teori	5
1. Administrasi	5
2. Pelaksanaan administrasi	11
6. Pemerintahan kampung	23
7. Sistem administrasi pemerintahan desa	24
8. Indikator	26
B. Penelitian terdahulu	27
C. Definisi operasional.....	29
D. Kerangka konseptual penelitian	30
BAB III. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN	
A. Lokasi dan waktu penelitia.....	33
B. Jenis penelitian.....	33
C. Populasi dan sampel.....	33
D. Instrumen penelitian	35
E. Teknik pengumpulan data.....	35
F. Teknik analisa data	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	43

1.Keadaan lokasi penelitian	43
2.Analisa data	50
B .Pembahasan	60

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Aparatur Kampung Sinarekowa Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya	44
Tabel 4.1 Keadaan responden berdasarkan umur.....	44
Tabel 4. 2 Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin.....	44
Tabel 4. 3 Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan	49
Tabel 4. 4 Keadaan responden berdasarkan lama bekerja.....	49
Tabel 4. 18 Rata-rata indikator tentang pemberdayaan pendidikan	61
Tabel 4. 19 Rata-rata indikator tentang pemberdayaan kesehatan	62
Tabel 4. 20 Rata-rata indikator tentang pemberdayaan ekonomi	63
Tabel 4. 21 Rata-rata indikator tentang pemberdayaan sosial budaya ..	64
Tabel 4. 22 Rekapitulasi rata-rata skor variabel pemberdayaan Masyarakat kampung melalui alokasi dana desa	65

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Lampiran 1 Surat Penelitian	69
2. Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian	73
3. Lampiran 3 Kuesioner	74
4. Lampiran 4 Identitas Responden	75
5. Lampiran 5 Data Hasil Penelitian	76
6. Lampiran 6 Identitas responden	77
7. Lampiran 7 Gambar Penelitian	78
8. Lampiran 8 Biodata Penulis	79

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka konseptual peneli	36
---	----

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, hidayah, petunjuk, dan perlindungan serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara khusus penulis dengan tulus hati menyampaikan banyak terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak DR. H. Rudihartono Ismail, S.Pd, M. Pd. Selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan tinggi.
2. Ibu Dra. Telly Nancy Silooy, M. Si selaku Dekan FISIP yang selalu memberikan bimbingan selama studi.
3. Bapak Girinius Wenda,S.Sos.M.Si. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik yang membimbing dan mengarahkan penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Amal Ilmiah (UNAI'M) Yapis Wamena.
4. Ibu Dra. Telly Nancy Silooy, M. Si. Selaku Pembimbing I dan Bapak Irsan Yelipele,S.Sos.M.Si. Selaku Pembimbing II, yang dengan sepenuh hati memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Defran Siska,SE.M.M. sebagai Dosen wali selama ini memberikan bimbingan kepada penulis selama studi.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena, khususnya pada Program Studi Administrasi Publik yang telah mendidik, membina dan mengabdikan ilmu kepada penulis, serta seluruh staf administrasi yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi selama studi.
7. Kepala kampung dan aparat yang sudah mendukung data dalam penulisan selama penelitian.

8. Bapak Kepala Kampung Sinarekowa dan seluruh Aparatur Kampung yang selama ini mendukung data dalam penyusunan study akhir.
9. Kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Horodak Matuan, Ibu Kowok Lagowan, kaka Warek Matuan, suami dan anak-anak ku yang selama ini mendorong, mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan kuliah.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program studi Administrasi Publik Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena, khususnya angkatan tahun 2018 atas kebersamaannya selama ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini dengan rela membantu penulis baik moril dan material selama menekun istudi maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sesuai yang diharapkan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat.

Wamena, Oktober 2022

P e n u l i s

MARIKE MATUAN

Nim: 201811104

ABSTRAKSI

MARIKE MATUAN, NIM. 201811104. Pemberdayaan masyarakat kampung melalui alokasi dana Desa di kampung sinarekowa Distrik wouma Kabupaten Jayawijaya(Pembimbing : Telly Nancy Silooy dan Irsan Yelipele).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan masyarakat kampung melalui alokasi dana Desa di kampung sinarekowa Distrik wouma Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini merupakan variabel mandiri dengan indikatornya: Pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial budaya. Populasi sebanyak 13 orang. Analisa data yang di gunakan adalah analisa dengan menggunakan skor.

Berdasarkan hasil analisa data, menunjukkan bahwa Pemberdayaan masyarakat kampung melalui alokasi dana Desa di kampung sinarekowa Distrik wouma Kabupaten Jayawijaya di peroleh skor sebesar 38,37 yang berada pada predikat baik. Hasil ini diperoleh dari indikator pemberdayaan pendidikan dengan jumlah skor 36, pemberdayaankesehatandenganjumlahskor39,25, pemberdayaan ekonomi dengan jumlah skor 39,6 dan pemberdayaan sosial budaya dengan jumlah skor 38,66.

Kata Kunci :Pemberdayaan, Masyarakat, Dana, Kampung.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peran yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada Negara yang maju tanpa Provinsi yang maju, tidak ada Provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah Negara di tentukan oleh kemajuan Desa. (Siti Ainul Wida, dkk, 2017).Pembangunan dana Desa merupakan sebagai gerakan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan yang dilandasi kesadaran untuk meningkatkan kehidupannya yang lebih baik dan kehidupan yang layak.Masyarakat atau penduduk Indonesia sebagian besar bertempat tinggal di pedesaan. Dengan jumlah penduduk dan keadaan alam yang meningkat dan berlimpah, pemerintah desa akan mendapatkan aset melalui program pemerintah yaitu Dana Alokasi Desa (ADD) berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Untuk menjalankan wewenangnya dalam mengatur dan mengelolah pemerintah dan kepentingan rakyat, desa-desa membutuhkan sumber pendapatan.Pendapatan Desa adalah sumber daya vital untuk administrasi desa. Filosofi dana Desa adalah untuk meningkatkan dan kesejateraan dan pemerataan pembangun desa melalui peningkatan layanan publik didesa, mempromosikan ekonomi desa, mengatasi kesenjangan antara pembangunan Desa dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Keberadaan dana desa di harapkan dapat meningkatkan pembangunan desa karena pemerintah desa mendapat Alokasi dana yang akan di gunakan untuk biaya modal pembangunan. (M.Rimawan, Fenny Aryani, 2019).

Dana Desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksana pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya

meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomilokal yang didasarkan ataskondisi dan potensi desa. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan dana desa masih dirasakan belum optimal dikarenakan belum memadainya kapasitas kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa. Memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik itu sumberdaya dari desa sendiri maupun dari luar merupakan salah satu tugas dari pemerintah desa. Salah satu Sumber dana dari luar desa adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah dalam wujud Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana desamengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desasebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. (Muhamad Mujtaba, dkk, 2020).

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya. Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan dengan menjadi ujung tombak dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah. Dengan di sahkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di harapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberlakukan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memuat tentang pelimpahan wewenang pemerintah kepada daerah untuk mengatur hal tersebut, daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya masing-masing berdasarkan aspirasi masyarakat. Hal ini akan semakin menambah peran strategis pemerintah dalam menempuh kebijakan yang dapat melahirkan program atau kegiatan pembangunan secara terpadu, termasuk didalamnya upaya yang mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir serta sikap mental mereka, salah satunya melalui program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat secara komprehensif harus menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas di bidang pemberdayaan masyarakat maupun di bidang pelayanan lainnya yang ada di desa, sehingga secara proaktif pemerintah desa merancang berbagai kebijakan dan program dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa (ADD) mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkatdesa.

(prasetyo, 2012).

Penggunaan Alokasi Dana Desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pembedayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk : Meningkatkan kualitas

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomikeluarga, Meningkatkan penanggulangan kemiskinanmelalui pemenuhan kebutuhanwarga miskin di desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 9).

Pemberian alokasi dana desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan di wilayahnya. Alokasi Dana Desa(ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus (Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal1 Ayat 10).

Tabel 1.1

Alokasi Dana Kampung Sinarekowa Distrik Wouma

Sumber Data: Kantor Kampung Sinarekowa, tahun 2021

No	Kegiatan	Tahun						Ket.
		2018		2019		2020		
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
	Anggaran Pendapatan Belanja Kampung	843.916.000	650.917.000.00	1.037.430.668	1.037.430.688	883.394.400		Tahun 2018 terlaksana hanya 70% .
1	Bidang Pendidikan		193.915.000		306.117.722		190.600.00	Tahun 2019 terlaksana hanya 60%
2	Bidang kesehatan		519.819.000		66.645.000			
3	Bidang ekonomi		51,932,000		592.716.946			
4	Bidang sosial		78.250.000		71.951.000			Tahun 2020 tidak terlaksana
	Jumlah		76.666.583 %	1.037.429		190.600.00		

Berdasarkan tabel 1.1 Alokasi Dana Kampung Sinarekowa diatas menerangkan bahwa dalam pelaksanaan realisasi program sering terjadi penyalagunaan dana yang dilakukan oleh aparat Kampung maupun masyarakat, yang dipercayakan untuk melaksanakan kegiatan pada masing – masing bidang dari tahun anggaran 2018 dan 2019 sedangkan untuk tahun anggaran 2020-2021 semua dana di alihkan sebagai bantuan langsung tunai (BLT) disebabkan wabah covid 19.

Hal-hal tersebut di atas yang menjadi faktor penghambat di dalam pemanfaatan dana kampung dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari empat aspek yakni : (a). pemberdayaan pendidikan adalah salah penggunaan di dalam pemberian beasiswa, pelatihan keterampilan, pelatihan administrasi kampung dan pelatihan ibu-ibu PKK. (b). pemberdayaan kesehatan adalah sering tidak diberdayakan membantu biaya ibu hamil, pemberian bantuan sukarela suster dan bantuan pengadaan obat. (c). pemberdayaan ekonomi adalah sering tidak diberdayakan program kerja tani, tidak di alokasikan dana untuk beli bibit, perikanan dan peternakan dan (d). pemberdayaan sosial adalah sering tidak diberdayakan untuk kembangkan tradisi budaya suku dani, kreativitas budaya suku dani, kebudayaan wisata adat honai dan bantuan melengkapi pakaian budaya tradisional suku dani.

Berdasarkan observasi awal, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan Judul **“Pemberdayaan Masyarakat Kampung Melalui Alokasi Dana Desa Di Kampung Sinarekowa Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu pemberdayaan masyarakat kampung melalui alokasi dana desa dengan 4 (Empat) indikator yaitu: (a). Pemberdayaan dibidang pendidikan, (b). Pemberdayaan dibidang kesehatan, (c). Pemberdayaan dibidang ekonomi dan (d). Pemberdayaan dibidang sosial budaya.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemberdayaan masyarakat kampung melalui alokasi dana desa di Kampung Sinarekowa ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat kampung melalui alokasi dana desa di Kampung Sinarekowa .

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

1. Memberikan sumbangsi pemikiran yang bersifat membangun untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang administrasi publik tentang pemberdayaan masyarakat kampung melalui alokasi dana desa di Kampung Sinarekowa

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini memberikan sumbangsi pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya khususnya kampung Sinarekowa Distrik Wouma dalam pemberdayaan masyarakat kampung melalui alokasi dana desa di Kampung Sinarekowa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya Eropa. Untuk memahami konsep *empowerment* secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005:57).

Sedangkan Menurut (Suhendra, 2006:74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara *evolitif* dengan keterlibatan semua potensi”. Selanjutnya pemberdayaan menurut Jim Ife (dari buku Suhendra, 2006:77) adalah “meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*)”.

Menurut Moh. Ali Aziz (2005: 169) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara

substansial merupakan proses memutus (*breakdown*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.

Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya. Menurut Tantan Hermansyah (2009:31). Setelah kita memahami mengenai definisi pemberdayaan, selanjutnya akan dibahas mengenai definisi pemberdayaan masyarakat menurut para ahli.

Menurut Sumaryadi, (2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:

- a. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan dan
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Widjaja, (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Menurut Abu Huraerah,

(2008:87) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang *lazim* disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

b. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyaikekuatan.

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* menurut Merriam Webster dalam *Oxford English Dictionary* mengandung dua pengertian yakni, “*To give ability or enable to*”, artinya “memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan”. Dan “*To give power of authority to*”, artinya “memberi kekuasaan”. Hakikat dari konseptualisasi *empowerment* berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu “melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan” dan “memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan”. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan.

Pemberdayaan Menurut (Friedman 1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Sedangkan (Priyono dan Pranarka 1996), berpendapat bahwa

pemberdayaan mendorong terjadinya proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional.

1). Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

a. Adanya kebutuhan

Kebutuhan mencakup kebutuhan bersama dipenuhi secara bersama pula, rasa ikut tanggung jawab atau memiliki dan rasa saling memiliki.

b. Keikutsertaan

Meliputi kesadaran berkembang untuk berperan serta, meningkatkan keinginan untuk memakai sumber-sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama, makin mendorong untuk ikut serta dalam pembangunan yang lebih luas, masyarakat dapat segera memperoleh informasi dan berkembangnya keterampilan.

c. Kesesuaian tujuan

Kesesuaian tujuan mencakup menumbuhkan semangat dan jiwa kebersamaan yang konstruktif.

d. Koperatif

Koperatif artinya memupuk kesadaran untuk saling bekerjasama, mengembangkan rasa kekeluargaan dan memperkokoh kelompok dalam mencegah perpecahan.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (Sutrisno, 2005) ada lima macam, yaitu:

- 1) Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- 2) Partisipasi (*participation*), dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- 3) Konsep keberlanjutan yang merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan

dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

4) Keterpaduan, yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.

5) Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri. Pendekatan Pemberdayaan Muncul Sebagai Orientasi Pembangunan Yang Baru Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang kemudian mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan *alienasi* masyarakat dari faktor produksi oleh penguasa (Priyono, 1996).

Gagasan pemberdayaan berangkat dari realitas obyektif yang merujuk pada kondisi struktural yang timpang dari sisi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumber daya masyarakat (Margot Breton dalam Eko, 2002).

Konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat *top-down* direorientasikan menuju pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan.

c. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas

kebutuhan masyarakat desa. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Menurut Edi Suharto (2010:60).

Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik/ material.

Menurut teori Nancy Foy sebagaimana yang dikutip oleh Gunawan Sumodiningrat terdapat empat unsur utama pemberdayaan yang saling mengaitkan satu dengan yang lainnya yaitu: pertama, pemberdayaan itu terfokuskan pada kinerja (*performance focus*), kedua, (*real teams*) kinerja yang baik dari tim yang baik, ketiga, pemberdayaan membutuhkan (*visible leadership*) seorang pemimpin yang memunyai visi, keempat, pemberdayaan membutuhkan komunikasi yang baik (*good communication*). Pemberdayaan senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu: masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang perlu diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Upaya pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai arah yang sama atau paling tidak, mirip satu sama yang lain. Langkah itu pada intinya bermuara pada perubahan yang dilakukan secara bertahap (*gradual*), konsisten (*consistent*), dan terus-menerus (*sustainable*).

d. Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan

Pemberdayaan bukan hanya penguatan individu (orang perorangan), tetapi juga pranata pranata (sistem dan strukturnya), pembaharuan kelembagaan, penanaman nilai, peranan masyarakat didalamnya, khususnya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, sekaligus merupakan pembudayaan demokrasi, demikian pula advokasi atau pembelaan yang lemah terhadap yang kuat dan persaingan yang tak sehat. Pemberdayaan tidak boleh membuat masyarakat menjadi tergantung pada pemberian. Apa yang dinikmati harus dihasilkan oleh usahanya sendiri. Dengan demikian manusia menjadi semakin mandiri dan bertumbuh dalam harga diri.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Alokasi Dana Desa adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

a. Maksud Anggaran Dasar Daerah

Anggaran Dasar Daerah dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

b. Tujuan

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagimasyarakat.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.
- c. Ketentuan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)
Besarnya dana ADD ditetapkan dengan rincian:
 - a) Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten diperhitungkan sebesar 10 persen sesuai pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".
 - b) Bantuan Dana Alokasi Umum atau DAU diperhitungkan sebesar 8 persen.
 - c) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diperhitungkan sebesar 10 persen.
 - d) Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan sebesar 10 persen. Untuk Usaha Perhubungan diperhitungkan secara netto.
 - e) Bagi Hasil Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
 - f) Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
 - g) Bagi Hasil Pajak Propinsi diperhitungkan sebesar 10 persen.
 - h) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, ditetapkan sebesar 70 persen sebagai Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM dari jumlah ADD dan 30 persen sebagai Alokasi Dana Desa Proposional atau ADDP dari
 - i) Jumlah ADD.
- d. Perhitungan
Dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:
 - 1) Perhitungan ADD untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus adil danmerata.
 - 2) Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian Anggaran Dasar Daerah yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut

Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM.

- 3) Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian Anggaran Dasar Daerah yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (misalnya: kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, dan kesehatan). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADD.
- 4) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan adil ditetapkan oleh daerah.
- 5) Besarnya ADDM adalah 70 persen dari jumlah Anggaran Dasar Daerah dan besarnya ADD (dana proporsional) adalah 30 persen dari jumlah Anggaran Dasar Daerah.

e. Penetapan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Penetapan dan hasil perhitungan ADD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Penetapan dan hasil perhitungan ADD dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan agustus setiap tahunnya.
3. Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten pada bulan maret untuk penghitungan Anggaran Daerah Daerah tahun berikutnya.

f. Pengaturan Dan Pengelolaan

Untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa yang adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- b) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
- c) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan.
- d) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggungjawab.
- e) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
- f) ADD merupakan salah satu sumber pendapatandesa.
- g) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan didesa.

g. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Sebagai pengelola dan penanggung jawab alokasi dana desa, pemerintah desa mempunyai sejumlah hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang perlu di hargai dan dilaksanakan.

i. Hak Pemerintah Desa

Menggunakan dana ADD untuk menyelenggarakan otonomi Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta potensi.

ii. Kewajiban Pemerintahan Desa

- a) Mengalokasikan dana Anggaran Dasar Daerah ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b) Semua kegiatan yang alokasi dananya dari ADD harus dibicarakan dengan seluruh komponen masyarakat melalui Forum Musrenbangdes dan mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.
- c) Mempertanggungjawabkan penyusunan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- d) Melaporkan perkembangan baik fisik maupun realisasi keuangan kepada Bupati lewat Camat sesuai ketentuan yang ditetapkan.

- e) Wajib meningkatkan pendapatan melalui pajak dan retribusi.
- f) Pemenuhan target PBB.

iii. Tanggung Jawab Pemerintahan Desa

- a) Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Membuat pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c) Mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dari Alokasi Dana Desa kepada publik.

h. Prinsip dan Dasar-dasar Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Sebagai program unggulan pemerintah kabupaten, maka Anggaran Dasar Daerah dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut :

i. Prinsip-prinsip Pengelolaan

- a) Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
- b) Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
- c) Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- d) Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- e) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
- f) Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
- g) Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah Provinsi / Kabupaten / Kota / Kecamatan / hingga Desa.

ii. Dasar-Dasar pengelolaan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
 - a) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Pebruari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - b) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD;
 - c) Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dalam proses perubahan.

iii. Penggunaan

Alokasi Dana Desa digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 70%. Arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk membiayai kegiatan meliputi:
 - i. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan belanja aparatur dan operasional Desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan prioritas sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan

Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding.

- b. Biaya operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
- c. Biaya tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, Honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT /RW.
- d. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
- e. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi Pembuatan/Perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding, Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, misalnya Penanganan keadaan darurat seperti bencana alam.

3.Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dalam peraturan Menteri juga telah diatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala

lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip (16 A Saibani), Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Media Pustaka, 2014), Prinsip: pertama, keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan, kedua, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

1. Tujuan Dana Desa

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa, apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Adapun tujuan dari dana desa berlandaskan hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
 - b. Mengentaskan kemiskinan.
 - c. Memajukan perekonomian desa.
 - d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
 - e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.
- Pengalokasian dari dana desa diantaranya:

- 1). Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.
- 2). Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota,

luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota.

3) Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: 30% untuk jumlah penduduk, 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan gubernur.

3. Prinsip Penggunaan Dana Desa

Dalam penetapan prioritas pembangunan dana desa perlu diperhatikan perinsip-perinsip penggunaan dana desa, diantaranya:

- a. Keadilan, yaitu: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan Sri Mulyani Indrawati, Buku Saku Dana Desa, (Jakarta: Kemenkeu, 2017).
- b. Kebutuhan prioritas, yaitu: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c. Kewenangan desa, yaitu: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa.
- d. Partisipatif, yaitu: mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan ketrampilan warga desa dan kearifan lokal.
- f. Tipologi desa, yaitu: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

4. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terutama, untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya:

- a. Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan:

- 1) Sarana prasarana desa, meliputi:
 - a) Lingkungan pemukiman, antara lain: pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah.
 - b) Transportasi antara lain: jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu.
 - c) Energy antara lain: pembangkit listrik, tenaga disel, jaringan distribusi tenaga listrik.
 - d) Informasi dan komunikasi antara lain: internet, telepon umum, website desa.
 - 2) Sarana prasarana sosial pelayanan dasar, meliputi:
 - a) Kesehatan masyarakat, antara lain: air bersih, MCK, posyandu, polindes.
 - b) Pendidikan dan kebudayaan, antara lain: perpustakaan desa.
 - 3) Sarana prasarana usaha ekonomi desa, meliputi:
 - a) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, antara lain: embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan dan kandang ternak.
 - b) Usaha ekonomi pertanian atau lainnya bersekala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa, satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran antara lain: lumbung desa, cold storage, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel, kendraan bermotor.
 - 4) Sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup, meliputi:
 - a) Kesiapsiagaan menanggapi bencana alam.
 - b) Penanganan bencana alam.
 - c) Penanganan kejadian luar biasa lainnya.
 - d) Pelestarian lingkungan hidup.
 - 5) Sarana prasarana lainnya.
- b. Penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk:

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
- 2) Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
- 3) Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
- 4) Pengembangan system informasi desa.
- 5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
- 6) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes Bersama.
- 7) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- 8) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- 9) Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- 10) Dukungan kesiapsiagaan menanggapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta kejadian luar biasa lainnya.
- 11) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Hakikatnya pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari rekayasa pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat. Slamet dalam Anwas (2014:49) menekankan juga bahwa “Hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya sendiri dan memperbaiki kehidupannya”. Selain itu, pemberdayaan diartikan pula sebagai proses penyuluhan pembangunan yang oleh Mardikanto (2013:100) diartikan

sebagai : Proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stake holders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejatara secara berkelanjutan.

Merujuk dari kutipan tersebut, maka filosofi pemberdayaan dapat digali dengan menggunakan konsep-konsep filosofi penyuluhan. Banyak kepustakaan tentang falsafah penyuluhan diantaranya falsafah yang sedang berkembang yaitu falsafah 3-T yaitu *teach, truth, and trust* (pendidikan, kebenaran, dan kepercayaan/keyakinan). Artinya pemberdayaan merupakan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran yang telah diyakini, dalam konteks pemberdayaan masyarakat dididik untuk menerapkan informasi baru yang telah di uji kebenarannya dan telah di yakini memberikan manfaat untuk perbaikan kesejahteraan. Selain itu kutipan yang sering dikemukakan oleh banyak pihak tentang filosofi atau falsafah pemberdayaan yaitu, Menurut Kesley dan Hearne dalam Mardikanto (2013:101) yang menyatakan bahwa :

Pada dasarnya pemberdayaan menyatakan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun potensi, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Winarmi dalam Suryana (2010:18) mengungkapkan bahwa “Inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian”. Oleh karena itu, umumnya sasaran dari pemberdayaan biasanya masyarakat yang tergolong masih atau belum berdaya secara material maupun non material agar dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki hingga masyarakat menjadi mandiri.

Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan daya dengan proses perubahan sosial yang memiliki tujuan memperkuat kelompok masyarakat

yang lemah dalam segi kualitas hidup menjadi berdaya melalui berbagai kegiatan melalui motivasi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, menggali serta mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

a. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip pada umumnya dapat difahami sebagai ketentuan yang harus ada atau harus dijalankan. Prinsip berfungsi sebagai dasar (pedoman) bertindak atau sebagai acuan dalam sebuah proses dan sebagai target capaian. Menurut Mathew dalam Mardikanto (2014:105) “Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Oleh Karena itu, prinsip akan berlaku secara umum, dapat diterima secara umum sehingga prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun menurut Najiati(2005:54) terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk pelaksanaan program pemberdayaan, yaitu:

- 1) Prinsip Kesetaraan adalah Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Sehingga terjadi proses pembelajaran.
- 2) Prinsip Partisipasi adalah Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai pada tahap tersebut memerlukan waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

- 3) Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian adalah Prinsip Keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang tidak mampu sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit.
- 4) Prinsip Berkelanjutan adalah Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya para pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Namun, secara perlahan dan pasti peran pendamping akan semakin berkurang bahkan hilang karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu system pendidikan, Menurut Mardikanto (2013:105) pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lama.
- b) Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat. Karena perasaan senang atau tidak senang akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/pemberdayaan di masa mendatang.
- c) Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dalam kegiatan/peristiwa yang lainnya.

c. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*). Terkait dengan hal ini, pembangunan merujuk pada upaya perbaikan terutama perbaikan mutu hidup manusia baik secara fisik, mental, ekonomi maupun

sosialbudaya. Menurut Mardikanto (2013: 109), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Perbaiki Kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
2. Perbaiki Usaha (*better business*). Perbaiki pendidikan (semangat belajar), perbaiki aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaiki Pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
4. Perbaiki Lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaiki Kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaiki masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan akan menimbulkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

d. Tahapan Pemberdayaan

Adapun beberapa tahapan dalam pemberdayaan menurut Wilson dalam Mardikanto (2013:122), yaitu :

- a) Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak memperoleh perhatian atau simpati dan partisipasi masyarakat.

- b) Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan dan hambatan-hambatan yang dirasakan untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diinginkan.
- c) Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
- d) Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya
- e) Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan yang ditunjukkan berkembangnya motivasi untuk melakukan perubahan
- f) Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan
- g) Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

e. Strategi Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan agar tercapainya suatu tujuan. Adapun strategi pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2013:167) yaitu:

- 1) Strategi sebagai suatu rencana
- 2) Strategi sebagai kegiatan
- 3) Strategi sebagai suatu instrumen
- 4) Strategi sebagai sistem
- 5) Strategi sebagai pola pikir dan

f. Pemberdayaan sebagai Proses Bina Masyarakat

Upaya pertama yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan adalah bina manusia, hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat. Salah satu untuk proses bina masyarakat yaitu dengan cara pembentukan kelompok. Kelompok adalah individu yang hidup bersama dalam suatu ikatan dan terdapat suatu interaksi sosial.

4. Ruang Lingkup Pemberdayaan

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan simultan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang diamis antara pemerintah dan yang diperintah. Dalam pemberdayaan diperlukan berbagai program pemberdayaan. Mardikanto (2012:166). Di antaranya:

- a. Pemberdayaan politik, pemberdayaan politik bertujuan meningkatkan *bargaining position* yang diperintah terhadap pemerintah. Melalui bargaining tersebut, yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan orang lain. Sumodiningrat, (2000:77).
- b. Pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan ekonomi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen, untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negative pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kambing hitam kegagalan program, dan penderita kerusakan lingkungan. Menurut Ambar Teguh Sulistiyanti, (2015:78).
- c. Pemberdayaan sosial budaya, pemberdayaan sosial budaya bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui human investmen guna meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*), dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia. Menurut Nancy Foy, (2015:18)
- d. Pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan lingkungan dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara

yang diperintah dan lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan. Menurut GunawanSumodiningrat, (2008:5).

- e. pemberdayaan pendidikan , pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan. Dalam proses ini transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan. Menurut Prijono, Pranarka, A.M.W, (2016:77).

Selanjutnya Menurut Robert H. Brook (2017: 585), kesehatan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia dan bukan merupakan suatu tujuan hidup yang perlu dicapai. Kesehatan tidak terfokus kepada fisik yang bugar tetapi meliputi jiwa yang sehat dimana dimana individu dapat bersikap toleran dan dapat menerima perbedaan.

5. Indikator Pemberdayaan

Dalam penelitian ini menggunakan teorinya **Ambar TeguhSulistiyanti**, (2015: 79)mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi empat yakni (1). pemberdayaan Pendidikan, (2). pemberdayaan Kesehatan, (3). pemberdayaan Ekonomi dan (4). pemberdayaan sosial budaya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil peneliti yang sudah dilakukan oleh orang lain namun sebagai penguatan sehingga dapat digunakan pada penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

No	NamaPeneliti	Judul penelitian	HasilPenelitian	Sumber/refrensi
1	Immanuel N. Tadaguni	Pemberdayaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Sarana dan prasarana di desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa,pemanfaatan dana desa dalam pembangunan kampung menunjukan masih rendah disebabkan salah pemanfatan/penggunaanya tidak sesuai program yang sudah di musyawarahkan.	Jurnal Ilmiah Administrasi, vol. 12, No.1 edisi maret 2019
2.	Muhammad MujtabaMitraZuana, Muawanah, Dian Rahmawati	PemberdayaanMasyarakatMelaluiOptimalisasi Program Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaandanadesa di DesaKemirisudahberjalansesuai denganjuknis yang ada, sehinggapembangunan di DesaKemiridariadanyadanadesa telahmendatangkanhasil yang cukupbanyak. Perubahanmulaidariperbaikansaranaprasarana, penyuluhanpendidikan, saranakesehatan dan lain-lain. Namundalambidangpemberdayaan di desakemirimasihbelum optimal halinidisebabkanmasihkurangnyapartisipasimasyarakatdalam pengelolaandanadesa. Di bidangpembangunanandanpemberdayaan, masyarakathanyadilibatkandalamperencanaanandanpelaksanaan, namundalamhalakuntabilitasdan evaluasi program	J-EBIS (JurnalEkonomi danBisnis Islam) Volume 5 Nomor 2, Oktober 2020

			danadesamasyarakatbelumdilibratkansecaralangsung	
3	M. Rimawan, Fenny Aryani	PengaruhAlokasi Dana DesaTerhadapPertumbuhanEkonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di KabupatenBima	Hasilanalisismenunjukkanbahwawariablealokasidanadesaberpengaruhpositifterhadapertumbuhanekonomi, indeks pembangunanmanusiase dangkanalokasidanadesatidakberpengaruhterhadapkemiskinan . Sehinggadiharapkankepadapemerintahdesalebihmeningkatkan program pemberdayaanmasyarakatuntuk pengentaskankemiskinan	JurnalIlmiahAkuntansidanHumanika, Vol. 9 No. 3, September-Desember 2019 ISSN: 2599-2651

C. Definisi Oprasional

Berdasarkan definisi operasional di atas maka, dalam penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu; Pemberdayaan masyarakat kampung melalui alokasi dana desa dalam terdiri dari 4 indikator yang akan digunakan yaitu; (1). pemberdayaan Pendidikan, (2). pemberdayaan Kesehatan, (3). pemberdayaan Ekonomi dan (4). pemberdayaan sosial budaya. Adapun indikator tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan pendidikan adalah merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh pemerintah kampung melalui musyawarah dan dana kampung sinarekowaa di alokasikan setiap pencairan dana kampung untuk mendorong mahasiswa/i dan siswa/i untuk pembayaran SPP khususnya berasal dari kampung sinarekowa.
- b. Pemberdayaan kesehatan adalah dibidang kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah kampung melalui musyawarah bahwa dana kampung di alokasikan bagi ibu hamil dan balita.

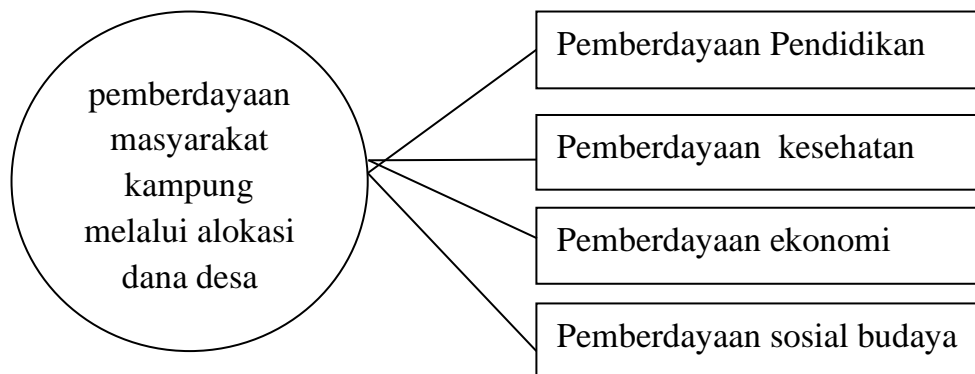
- c. Pemberdayaan ekonomi adalah melalui dana kampung pemerintah kampung sinarekowa alokasikan dana untuk membuat kelompok tani seperti keladi, ubi, jagong dll tujuannya masyarakat lebih mandiri dalam menjalankan program itu sendiri.
- d. Pemberdayaan sosial budaya adalah pemerintah kampung sinarekowa alokasikan dana kampung untuk meningkatkan tradisi kebiasaan budaya lembah dan melestarikan seperti anyam noken dll.

D. Krangka Konseptual

Untuk menciptakan penelitian kerangka konseptual penelitian yang baik penulis membuat sebuah konsep penelitian sebagai berikut:

Gambar : 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian



Berdasarkan kerangka konseptual penelitian maka, pertama-tama terlebih dahulu menjelaskan variabel pemberdayaan masyarakat kampung melalui alokasi dana desa kemudian selanjutnya uraikan masing-masing indikator yakni; (a). Pemberdayaan pendidikan, (b). Pemberdayaan kesehatan, (c). Pemberdayaan ekonomi dan (d). Pemberdayaan sosial budaya.

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di
Kampung Sinarekowa Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya

Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurang lebih
selama ± 1 (bulan).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kuantitatif yang berusaha mendiskripsikan dan merumuskan hasil penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang telah diteliti. Menurut sugiyono (2009: 90), penelitian deskriptif kuantitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek atau subjek penelitian dan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Jenis penelitian ini di dasarkan atas pemikiran dan alasan bahwa permasalahan yang diteliti merupakan suatu fenomena yang terjadi sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada lokasi penelitian di Kampung Sinarekowa Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Menurut Moleong (2010 : 224), yang dimaksud dengan sampling dalam penelitian kualitatif adalah yang pertama, menjangkau sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan konstruksinya. Sedangkan yang kedua adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (*key-informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informasi kunci tersebut maka penulis menggunakan "purposive sampling" atau sampling bertujuan yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam sampelnya (Arikunto, 2000:128). Menurut penulis yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yakni sebanyak 13 (tiga belas) orang yaitu:

1. Kepala Kampung : 1 Orang.
2. Aparat kampung : 6 Orang
3. Masyarakat : 6 Orang.

Jumlah 13 Orang.

2. Sampel

Menurut Sudjana dalam Nawawi (1995:144), sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Penentuan sampel hendaknya memperhitungkan berbagai aspek karena kesimpulan dari hasil penelitian yang dipelajari melalui sampel harus dapat diberlakukan pula untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil harus representatif, sehingga betul-betul mewakili keseluruhan populasi.

Berdasarkan jumlah populasi dalam penelitian ini yakni sebanyak 13 orang maka teknik penarikan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling Menurut Sugiyono, (2008:96), adalah teknik penarikan sampel yang apabila populasinya kurang dari 30, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 13 orang.

D. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2009: 118), mengemukakan instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang diamati. Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner), kuesioner menggunakan skala likhert dengan alternative jawaban yakni :

1. Sangat baik skor 4
2. Baik skor 3
3. Cukup baik skor 2
4. Kurang baik skor 1

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data penilaian, mendapatkan data dapat dilakukan dalam berbagai cara dan berbagai sumber teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1). Kajian kepustakaan

Kepustakaan yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui perputakaan, baik itu berupa buku-buku literatur, diktat – diktat, bahan dari materi perkuliahan, peraturan – peraturan, undang – undang dan sebagiannya yang memuat keterangan tentang masalah yang diperlukan dalam

pembahasan ini.

2). Pengamatan (*Observasi*)

Suetrisno hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, *observasi* merupakan suatu proses yang sangat kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Boleh dikatakan bahwa pengamatan dan pencatatan gejala – gejala yang nampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung di tempat peristiwa, keadaan atau situasi yang sedang terjadi.

i. Kuesioner

Menurut Sugiyono, (2008 : 162), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan. Dan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner adalah teknik utama dalam pengumpulan data penelitian untuk mengungkapkan data tentang upaya – upaya yang dilakukan dalam peningkatan pendapatan asli di Kampung Sinarekowa distrik Wouma .

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Melalui analisis ini hasil penelitian diuraikan untuk memperoleh gambaran dan angka – angka yang jelas terhadap objek penelitian yang diteliti. **Menurut hasan (2006 : 34)**, teknik analisa data suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau data ringkasan dengan menggunakan cara – cara atau rumus – rumus tertentu. Pengelolaan data bertujuan untuk mengubah data menta dari hasil pengukuran menjadi data yang menjadi lebih halus, sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut.

$$\begin{aligned} \text{Jarak skor ideal (skor maksimum)} &= 4 \times \text{jumlah responden} \\ &= 4 \times 13 \\ &= 52 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah skor terendah (skor minimum)} &= 1 \times \text{jumlah responden} \\ &= 1 \times 13 \end{aligned}$$

= 13

Berdasarkan nilai skor terendah (skor minimum) 13 dan skor ideal (skor maksimum) 52 maka diinterpretasikan ke dalam tabel di bawah ini :

Tabel : 3. 2
Interpretasi nilai skor

No	Nilai Skor	Predikat
1	$39 < \text{Jumlah skor} \leq 52$	Sangat baik
2	$26 < \text{Jumlah skor} < \underline{39}$	Baik
3	$13 < \text{Jumlah skor} \leq 26$	Kurang baik
4	$1 < \text{Jumlah skor} \leq 13$	Tidak baik

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Lokasi Penelitian

a. Sejarah kampung sinarekowa

Nama kampung sinarekowa diambil dari sebuah pohon sin besar yang tumbuh sejak dahulu kala duluh pohon tersebut Menurut masyarakat sinarekwa merupakan salah satu pohon sakral (*wesama*). Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memekarkan kantor pemerintahan

tingkat Distrik Wouma dan sekaligus mekarkan 7 kantor pemerintahan kampung salah satunya adalah pemerintahan kampung sinarekowa.

b. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Surat Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 661 tahun 2018 tentang pengesahan pengangkatan 328 kepala kampung pada 40 Distrik Kabupaten Jayawijaya.

c. Jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya

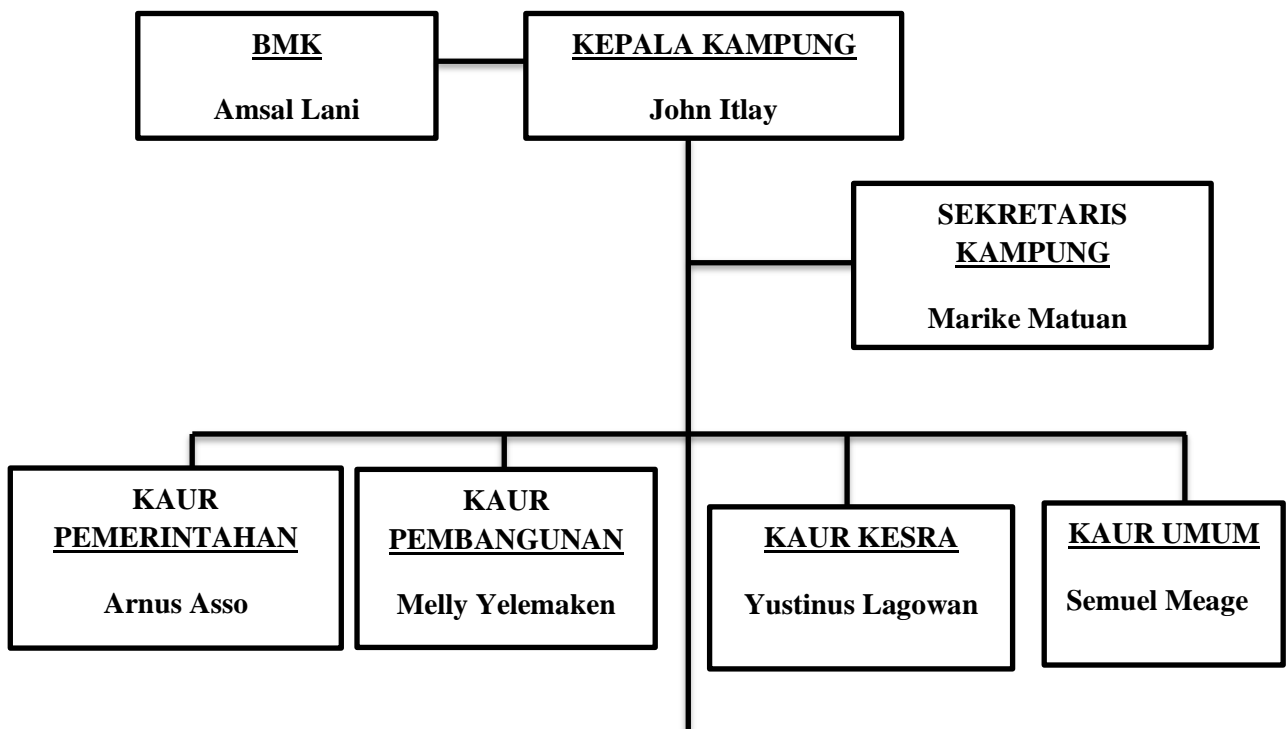
Jumlah populasi penduduk Kabupaten Jayawijaya sebanyak 269553 jiwa, jumlah populasi tingkat Distrik wouma sebanyak 6760 jiwa dan jumlah populasi kampung sinarekowa sebanyak 101 jiwa. . (Sumber: Kabupaten Jayawijaya dalam angka 2021, BPS).

d. Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung Sinarekowa

Berdasarkan susunan organisasi pemerintahan Kampung Sinarekowa Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya, maka dapat digambarkan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar : 4. 1

**STRUKTUR ORGANISASI
Aparatur Kampung Sinarekowa
Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya**



**KEPALA KEWILAYAH/
DUSUN**

Kolik Wetipo

Keterangan :

Garis Komando

Garis Koordinator -----

Sumber data: Kantor kampung sinarekowa , tahun 2022

Struktur aparatur pemerintahan kampung Sinarekowa Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Jayawijaya No 4 Tahun 2004, susunan Organisasi pemerintah Kampung terdiri dari

1. Kepala Kampung

Tugas dan Fungsi kepala Kampung adalah:

- a. Memimpin Penyelenggara pemerintah kampung
- b. Membina kehidupan masyarakat kampung
- c. Membina perekonomian kampung
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung
- f. Mewakili kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukumnya.

Dalam pelaksanaan tugas kepala Kampung dibantu oleh sekretaris kampung.

2. Sekretaris Kampung

Tugas dan fungsi sekretaris Kampung

a. sekretaris kampung mempunyai tugas antara lain :

1. menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kampung.
2. memberikan pelayanan administrasi kepada kepala kampung

b. Fungsi Sekretaris kampung adalah :

1. melaksanakan urusan surat-menyurat
2. kearsiapan dan laporan
3. melaksanakan urusan administrasi pemerintahan
4. melaksanakan tugas dan fungsi dari kepala kampung apabila kepala kampung berhalangan melakukan tugasnya.

3. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan yaitu :

- a. mengisi buku keputusan pemerintahan kampung
- b. mengisi buku kekayaan dan inventaris kampung buku data tanah di kampung.
- c. mengisi buku administrasi penduduk buku data penduduk yang terdiri dari : data induk penduduk dan data rekapitulasi akhir bulan.
- d. melaksanakan urusan pemerintahn lainnya.

4. Kepala Urusan Umum

Kedudukan kepala urusan umum adalah sebagai unsur pembantu sekretaris Kampung dalam bidang tugasnya, Fungsi Kepala Urusan adalah kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan pelayanan administrasi terhadap kepala kampung.

Tugas Kepala Urusan Umum adalah membantu sekretaris dan kepala urusan bertanggung jawab kepada sekretaris Kampung.

Sedangkan Fungsi Kepala Urusan yaitu :

- a) mengisi buku kekayaan dan inventaris Kampung
- b) mengisi buku agenda surat masuk dan surat keluar
- c) mengisi buku administrasi keuangan kampung
- d) melaksanakan surat menyurat dan kearsipan

5. Kepala Urusan Pembangunan

Tugas kepala Urusan Pembangunan adalah :

- 1. melaksanakan administrasi pembangunan
- 2. mencatat dan mempersiapkan bahan guna pembuatan usulan rencana proyek
- 3. mengadakan pelayanan dan pencatatan dalam hal pembuatan permohonan izin usaha bangunan dan lain-lain.

6. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

- a. Tugas urusan kesejahteraan Rakyat adalah :
- b. melaksanakan pencatatan surat dan keadaan kesejahteraan rakyat
- c. mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat dan PKK, mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat dan PKK
- d. menerbitkan surat menyurat keterangan lainnya misalnya seperti :
 - 1. kematian
 - 2. surat keterangan minta sumbangan untuk kerja bakti

c. Tata Kerja Pemerintahan Kampung

Kepala kampung selaku kepala pemerintahan kampung mempunyai kewenangan untuk membimbing, membina serta mengadakan koordinasi dengan Badan Musyawara Kampung, dengan staf yang berada dibawah kepala kampung dalam menyelenggarakan segala urusan pemerintahan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan membina kehidupan masyarakat dalam pembangunan kampung untuk menyelenggarakan tugas administrasi umum di kampung, dilaksanakan oleh sekretaris kampung dan kepala kampung membawahi 4 kepala

kampung urusan yaitu : kepala Urusan Pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum dan kepala urusan kesejahteraan masyarakat.

2. Keadaan Responden

Jumlah responden sebanyak 13 orang, dapat dilihat pada tabel berikut ini

a. Keadaan Responden Berdasarkan Umur.

untuk mengetahui keadaan umur Responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 4. 1

Keadaan Responden Berdasarkan Umur.

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase
1	20-30	6	46,15
2	31-40	7	53,85
Jumlah		13	100

Sumber data : Primer tahun, 2022

Dari data tabel 4. 1. tersebut menunjukkan bahwa keadaan umur Responden adalah yang berumur antara 20-30 tahun sebanyak 6 orang atau 46,15%, yang berumur antara 31-40 sebanyak 7 orang atau 53,85 % .

b. Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Keadaan jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel : 4. 2

Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	8	61,54
2	Perempuan	5	38,46
Jumlah		13	100

Sumber data: Primer tahun, 2022.

Berdasarkan tabel 4. 2. diatas menunjukkan bahwa keadaan Responden berdasarkan jenis kelamin yaitu berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang atau 61,54% dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 5 orang atau sebanyak 38,46%.

d. Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Untuk mengetahui tingkat pendidikan Responden maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 3

Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SMP	2	15,38
2	SMA	5	38,46
3	SMK	6	46,15
Jumlah		13	100

Sumber data: Primer tahun 2022

Berdasarkan tabel 4. 3. diatas menunjukkan bahwa responden yang lulusan (SMP) sebanyak 2 orang atau 15,38%, yang lulusan SMA sebanyak 5 orang atau 38,46 % sedangkan yang lulusan SMK sebanyak 6 orang atau 46,15%.

Tabel . 4. 4

Keadaan Responden Berdasarkan Lama Bekerja.

No	Tingkat Jabatan	Lama bekerja	Presentase
1	Kepala kampung	3	23,07
2	Sekretaris	4	30,76
3	Bendahara	2	15,38
4	Sub-sub	2	15,38
5	Seksi-seksi	2	15,38
	Jumlah	13	100

Sumber data: Primer tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.4. diatas menunjukkan bahwa responden yang Jabatan kepala desa bekerja 3 tahun atau 23,07%, yang jabatan sekretaris lama bekerja 4 tahun atau 30,76 % sedangkan jabatan bendahara lama bekerja 2 tahun atau 15,38%, kemudian yang jabatan bagian sub-sub lama bekerja 2 orang atau 15,38%, dan yang bagian seksi-seksi lama bekerja 2 orang 15,38 %.

2. Analisa Data

Pemberdayaan masyarakat kampung melalui alokasi dana Desa di Kampung Sinarekowa Distrik wouma Kabupaten Jayawijaya. Adapun empat indikator tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Pemberdayaan Pendidikan

Adapun yang menjadi indikator dapat di lihat pada tabel dibawa ini.

1. Tanggapan Responden tentang.Pemberian beasiswa bagi masyarakat yang membutuhkan, dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 5

Tanggapan Responden Tentang . Pemberian beasiswa bagi masyarakat yang membutuhkan

Kategori	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat baik	4	2	8
Baik	3	7	21
Kurang baik	2	3	6

Tidak baik	1	1	1
Jumlah		13	36

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik berdasarkan Pemberian beasiswa bagi masyarakat yang membutuhkan sebanyak 2 orang dengan jumlah Skor sebesar 8, yang mengatakan baik sebanyak 7 orang atau jumlah skor sebesar 21, yang mengatakatan kurang baik sebanyak 3, orang dengan jumlah skor 6 dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang atau dengan jumlah skor 1. Jadi hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pemberian beasiswa bagi masyarakat yang membutukandikategorikan Baik yaitu dengan skor 36.

2. Tanggapan responden tentang. Pemberian dana bagi peningkatan keterampilan masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 4. 6

Tanggapan Responden. Tentang Pemberian dana bagi peningkatan keterampilan masyarakat

Kategori	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat baik	4	3	12
Baik	3	7	21
Kurang baik	2	2	4
Tidak baik	1	1	1
Jumlah		13	38

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik Pemberian dana bagi peningkatan keterampilan masyarakat sebanyak 3 orang atau jumlah skor sebesar 12, yang mengatakan baik sebanyak 7 orang atau jumlah skor sebanyak 21, yang mengatakan kurang baik sebanyak 2 orang atau jumlah skor sebesar 4, yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang atau jumlah skor sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa Pemberian dana bagi

peningkatan keterampilan masyarakat di kategorikan Baik yaitu dengan skor 38.

3. Tanggapan Responden tentang Pemberian dana bagi pembinaan masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel : 4. 7

Tanggapan Responden Tentang Pemberian dana bagi pembinaan masyarakat

Kategori	Skor	Frekuensi	Jumlah skor
Sangat Baik	4	2	8
Baik	3	7	21
Kurang baik	2	2	4
Tidak Baik	1	2	1
Jumlah		13	34

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik Pemberian dana bagi pembinaan masyarakat sebanyak 2, orang dengan jumlah skor 8, yang mengatakan baik, sebanyak 7, orang dengan jumlah skor sebesar 21, yang mengatakan kurang baik sebanyak 2 orang dengan jumlah skor sebesar 2, yang mengatakan tidak baik sebanyak 2 orang dengan jumlah skor sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa Pemberian dana bagi pembinaan masyarakat di kategorikan Baik yaitu dengan skor 34.

b. Pemberdayaan kesehatan

1. Tanggapan Responden tentang Membantu biaya ibu hamil, dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 8

Tanggapan Responden Tentang . Membantu biaya ibu hamil

Kategori	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat baik	4	7	28

Baik	3	4	12
Kurang baik	2	1	2
Tidak baik	1	1	1
Jumlah		13	43

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik berdasarkanMembantu biaya ibu hamilsebanyak 7 orang dengan jumlah Skor sebesar 28, yang mengatakan baik sebanyak 4 orang atau jumlah skor sebesar 12, yang mengatakatan kurang baik sebanyak 1, orang dengan jumlah skor 2 dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang atau dengan jumlah skor 1. Jadi hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan membantu biaya ibu hamildikategorikan Sangat Baik yaitu dengan skor 43.

2. Tanggapan Responden tentang. Pemberian giji bagi balita, dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 9

Tanggapan Responden Tentang . Pemberian giji bagi balita

Kategori	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat baik	4	4	16
Baik	3	7	21
Kurang baik	2	1	2
Tidak baik	1	1	1
Jumlah		13	40

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik berdasarkanPemberian giji bagi balitasebanyak 4 orang dengan jumlah Skor sebesar 16, yang mengatakan baik sebanyak 7orang atau jumlah skor sebesar 21, yang mengatakatan kurang baik sebanyak 1, orang dengan jumlah skor 2 dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang atau dengan

jumlah skor 1. Jadi hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pemberian gaji bagi balitadikategorikanBaik yaitu dengan skor 40.

3. Tanggapan Responden tentang. Pemberian honor bagi tenaga kesehatan, dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 10

Tanggapan Responden Tentang . Pemberian honor bagi tenaga kesehatan

Kategori	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat baik	4	3	12
Baik	3	5	15
Kurang baik	2	3	6
Tidak baik	1	2	1
Jumlah		13	34

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik berdasarkanPemberian honor bagi tenaga kesehatansebanyak 3 orang dengan jumlah Skor sebesar 12, yang mengatakan baik sebanyak 5orang atau jumlah skor sebesar 15, yang mengatakatan kurang baik sebanyak 3, orang dengan jumlah skor 6 dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 2 orang atau dengan jumlah skor 1. Jadi hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pemberian honor bagi tenaga kesehatandikategorikan Baik yaitu dengan skor 34.

4. Tanggapan Responden tentang. Pemberian bantuan dana bagi fasilitas pengobatan, dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 11

Tanggapan Responden Tentang . Pemberian bantuan dana bagi fasilitas pengobatan

Kategori	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat baik	4	5	20

Baik	3	5	15
Kurang baik	2	2	4
Tidak baik	1	1	1
Jumlah		13	40

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik Pemberian bantuan dana bagi fasilitas pengobatan sebanyak 5 orang dengan jumlah Skor sebesar 20, yang mengatakan baik sebanyak 5 orang atau jumlah skor sebesar 15, yang mengatakan kurang baik sebanyak 2, orang dengan jumlah skor 4 dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang atau dengan jumlah skor 1. Jadi hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pemberian bantuan dana bagi fasilitas pengobatan dikategorikan Sangat Baik yaitu dengan skor 40.

c. Pemberdayaan ekonomi

1. Tanggapan Responden tentang. Program kerja tani, dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 12

Tanggapan Responden Tentang . Program kerja tani

Kategori	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat baik	4	4	16
Baik	3	7	21
Kurang baik	2	1	2
Tidak baik	1	1	1
Jumlah		13	40

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik berdasarkan program kerja tani sebanyak 4 orang dengan jumlah Skor sebesar 16, yang mengatakan baik sebanyak 7 orang atau jumlah skor sebesar 21, yang mengatakan kurang baik sebanyak 2, orang dengan jumlah skor 2 dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang atau dengan jumlah skor

1. Jadi hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan program kerja tanidikategorikan Baik yaitu dengan skor 40.
2. Tanggapan Responden tentang. Alokasikan dana untuk beli bibit sayur, dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 13

Tanggapan Responden Tentang . Alokasikan dana untuk beli bibit sayur

Kategori	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat baik	4	3	12
Baik	3	8	24
Kurang baik	2	1	2
Tidak baik	1	1	1
Jumlah		13	39

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik berdasarkanAlokasikan dana untuk beli bibit sayursebanyak 3 orang dengan jumlah Skor sebesar 12, yang mengatakan baik sebanyak 8orang atau jumlah skor sebesar 24, yang mengatakatan kurang baik sebanyak 1, orang dengan jumlah skor 2 dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang atau dengan jumlah skor 1. Jadi hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Alokasikan dana untuk beli bibit sayur dikategorikan Baik yaitu dengan skor 39.

3. Tanggapan Responden tentang. Pemberian modal usaha ternak, dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 14

Tanggapan Responden Tentang . Pemberian modal usaha ternak

Kategori	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat baik	4	5	20
Baik	3	5	15

Kurang baik	2	2	4
Tidak baik	1	1	1
Jumlah		13	40

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik berdasarkan Pemberian modal usaha ternak sebanyak 5 orang dengan jumlah Skor sebesar 20, yang mengatakan baik sebanyak 5 orang atau jumlah skor sebesar 15, yang mengatakan kurang baik sebanyak 2, orang dengan jumlah skor 4 dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang atau dengan jumlah skor 1. Jadi hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pemberian modal usaha ternak dikategorikan Sangat Baik yaitu dengan skor 40.

d. Pemberdayaan sosial budaya

1. Tanggapan Responden tentang. Kembangkan tradisi budaya suku dani, dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 15

Tanggapan Responden Tentang . Kembangkan tradisi budaya suku dani

Kategori	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat baik	4	2	8
Baik	3	8	24
Kurang baik	2	1	2
Tidak baik	1	2	1
Jumlah		13	35

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik berdasarkan Kembangkan tradisi budaya suku dani sebanyak 2 orang dengan jumlah Skor sebesar 8, yang mengatakan baik sebanyak 8, orang atau

jumlah skor sebesar 24, yang mengatakan kurang baik sebanyak 1, orang dengan jumlah skor 2 dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang atau dengan jumlah skor 1. Jadi hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Kembangkan tradisi budaya suku danidikategorikan Baik yaitu dengan skor 35.

2. Tanggapan Responden tentang. Kreativitas masyarakat kampung sinarekowa budaya suku dani, dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 16

Tanggapan Responden Tentang . Kreativitas masyarakat kampung sinarekowa budaya suku dani

Kategori	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat baik	4	2	8
Baik	3	9	27
Kurang baik	2	1	2
Tidak baik	1	1	1
Jumlah		13	38

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik berdasarkanKreativitas masyarakat kampung sinarekowa budaya suku danisebanyak 2 orang dengan jumlah Skor sebesar 8, yang mengatakan baik sebanyak 9orang atau jumlah skor sebesar 27, yang mengatakan kurang baik sebanyak 1, orang dengan jumlah skor 2 dan yang mengatakan tidak

baik sebanyak 1 orang atau dengan jumlah skor 1. Jadi hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Kreativitas masyarakat kampung sinarekowa budaya suku danidikategorikan Baik yaitu dengan skor 38.

3. Tanggapan Responden tentang. Mempertahankan dan kembangkan simbol budaya suku dani, dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 17

Tanggapan Responden Tentang . Mempertahankan dan kembangkan simbol budaya suku dani

Kategori	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat baik	4	7	28
Baik	3	4	12
Kurang baik	2	1	2
Tidak baik	1	1	1
Jumlah		13	43

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik berdasarkanMempertahankan dan kembangkan simbol budaya suku danisebanyak 7 orang dengan jumlah Skor sebesar 28, yang mengatakan baik sebanyak 4orang atau jumlah skor sebesar 12, yang mengatakatan kurang baik sebanyak 1, orang dengan jumlah skor 2 dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang atau dengan jumlah skor 1. Jadi hal ini menunjukkan

bahwa berdasarkan Mempertahankan dan kembangkan simbol budaya suku danidikategorikan Sangat Baik yaitu dengan skor 43.

B. Pembahasan

Berikut ini adalah pembahasan dari hasil analisa data maka dapat di dibahas sebagai berikut :

a. Indikator pemberdayaan pendidikan

Indikator tentang pemberdayaan pendidikan yang terdiri dari beberapa sub indikator yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 18

Rata-Rata Indikator Tentang pemberdayaan pendidikan

No	Sub Indikator	Skor				Rata-rata Skor
		4	3	2	1	
1.	Pemberian beasiswa bagi masyarakat yang membutuhkan	8	21	6	1	36
2.	Pemberian dana bagi peningkatan keterampilan masyarakat	12	21	4	1	38
3.	pemberian dana bagi pembinaan masyarakat	8	21	4	1	34
	Rata –rata					36

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor indikator pemberdayaan pendidikan adalah 36 predikat Baik.

Data diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pemberdayaan pendidikan pemberian beasiswa bagi yang membutuhkan predikat Baik.

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai pemberdayaan pendidikan pemberian beasiswa bagi yang membutuhkan predikat Baik.

b. Indikator Tentang pemberdayaan kesehatan

Indikator tentang pemberdayaan kesehatan yang terdiri dari beberapa sub indikator yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 19
Rata-Rata Indikator Tentang pemberdayaan kesehatan

No	Sub Indikator	Skor				Rata-rata Skor
		4	3	2	1	
1	Membantu biaya ibu hamil	28	12	2	1	43
2	Pemberian giji bagi balita	16	21	2	1	40
3	Pemberian honor bagi tenaga kesehatan	12	15	6	1	34
4	Pemberian bantuan dana bagi fasilitas pengobatan	20	15	4	1	40
	Rata –rata					39,25

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor indikator pemberdayaan kesehatan adalah 39,25 predikat Sangat Baik.

Data diatas menunjukkan bahwa berdasarkan mengenai pemberdayaan kesehatan pemberian bantuan gizi, honor dan fasilitas pengobatan predikat Sangat Baik.

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai mengenai pemberdayaan kesehatan pemberian bantuan gizi, honor dan fasilitas pengobatan predikat Sangat Baik.

c. Indikator Tentang pemberdayaan ekonomi

Indikator tentang pemberdayaan ekonomi yang terdiri dari beberapa sub indikator yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4 : 20

Rata-Rata Indikator Tentang pemberdayaan ekonomi

No	Sub Indikator	Skor				Rata-rata Skor
		4	3	2	1	
1	Program kerja tani	16	21	2	1	40
2	Alokasikan dana untuk beli bibit sayur	12	24	2	1	39
3	Pemberian modal usaha ternak	20	15	4	1	40
	Rata –rata					39,6

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor indikator pemberdayaan ekonomi adalah 39,6 predikat Baik.

Data diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pemberdayaan ekonomi ketika pemberian modal usaha ternak dan usaha sayur-,ayur dan lainnya predikat Baik.

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai pemberdayaan ekonomi ketika pemberian modal usaha ternak dan usaha sayur-,ayur dan lainnya predikat Baik.

d. Indikator Tentang pemberdayaan sosial budaya

Indikator tentang pemberdayaan sosial budaya yang terdiri dari beberapa sub indikator yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4 . 21

Rata-Rata Indikator Tentang pemberdayaan sosial budaya

No	Sub Indikator	Skor				Rata-rata Skor
		4	3	2	1	
1	Kembangkan tradisi budaya suku dani	8	24	2	1	35
2	Kreativitas masyarakat kampung sinarekowa budaya suku dani	8	27	2	1	38
3	Mempertahankan dan kembangkan simbol budaya suku dani	28	12	2	1	43
	Rata –rata					38,66

Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor indikator pemberdayaan sosial budaya adalah 38,66 predikat Baik.

Data diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pemberdayaan sosial budaya dalam mempertahankan dan kembangkan kreativitas kebudayaan predikat Baik.

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai pemberdayaan sosial budaya dalam mempertahankan dan kembangkan kreativitas kebudayaan predikat Baik.

Tabel 4. 22

Rekapitulasi rata-rata skor variabel pemberdayaan masyarakat kampung melalui alokasi dana desa.

No	Indikator	Skor	Predikat
1.	Pemberdayaan pendidikan	36	Baik
2.	Pemberdayaan kesehatan	39,25	Sangat baik
3.	Pemberdayaan ekonomi	39,6	Baik
4.	Pemberdayaan sosial budaya	38,66	Baik
	Rata – rata	38,37	Baik

Sumber data: primer diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4. 22 di atas bahwa masing-masing indikator terdiri dari pemberdayaan pendidikan adalah 36 Baik, pemberdayaan kesehatan adalah

39, 25 Sangat Baik, pemberdayaan ekonomi adalah 39, 6 Baik, pemberdayaan sosial budaya adalah 38, 66 Baik.

Jadi pemberdayaan masyarakat kampung melalui alokasi dana Desa di kampung sinarekowa Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya telah berjalan dengan baik. Berbeda dengan hasil penelitian dari Muhammad Mujtaba Mitra Zuana, Muawanah, Dian Rahmawati. Mengatakan bahwa bidang pemberdayaan di Desa Kemiri masih belum optimal disebabkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyebabkan dana desa.

Hasil pengamatan terkait pemberdayaan masyarakat kampung melalui alokasi dana desa di Kampung Sinarekowa saat ini sudah baik dalam pengalokasian dana untuk pemberdayaan masyarakat pada masing-masing program kerja yang sudah di usulkan oleh masyarakat dalam musyawarah kampung maupun yang sudah ada dalam draf. Pemerintah Kampung Sinarekowa mengalokasi dana untuk pemberdayaan masing-masing bidang bervariasi tergantung setiap tahunnya berapa banyak di alokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah hingga kampung jadi tidak sama sehingga alokasikan dana kepada masing-masing bidang juga bervariasi berdasarkan jumlah dana kampung di setiap tahunnya jadi memang sulit di pastikan masing-masing bidang alokasikan berapa jumlahnya. Pemerintah Kampung Sinarekowa dalam pengalokasian dana bervariasi namun untuk pemberdayaan masyarakat masing-masing bidang selama ini berjalan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan , maka dapat ditarik kesimpulan

Rata-rata variabel pemberdayaan masyarakat kampung melalui alokasi dana desa dengan indikator yaitu (a). Pemberdayaan pendidikan adalah 36 Baik (b), Pemberdayaan kesehatan adalah 39, 25 Sangat Baik (c). Pemberdayaan ekonomi adalah 39, 6 Baik (d). pemberdayaan sosial budaya adalah 38, 66 Baik.

Jadi pemberdayaan masyarakat kampung melalui alokasi dana desa dengan skor 38,37 predikat Baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyampaikan beberapa saran :

1. Perlu adanya pembagian alokasi dana desa yang jelas untuk pemberdayaan pendidikan khususnya pendidikan keterampilan masyarakat.
2. Perlu adanya pembagian alokasi dana desa yang jelas untuk pemberdayaan kesehatan masyarakat, honorer bagi tenaga kesehatan.
3. Perlu adanya pembagian alokasi dana desa yang jelas untuk pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat.
4. Perlu adanya pembagian alokasi dana desa yang jelas untuk pemberdayaan sosial budaya khususnya melestarikan tradisi keterampilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A . BUKU

Bangun,Wilson. 2012. “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Jakarta: Erlangga. Handayaniingrat, Soewarno. *Pengantar ilmu pengetahuan dan manajemen*,: Gunungagung, Jakarta, 1988.

Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta; Graha Ilmu.

Kuswantoro, 2017. Factor-faktor yang mempengaruhi pelayanan administrasi. Kawasan asia tengara.

Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta:Penerbit:Erlangga

Syafiie, I.K. (2006). Ilmu Administrasi Publik (edisi ke 2). Jakarta: PTR Ineka Cipta

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi. Bandung; Alfabeta.

Sugiyono. 2008. Statistika Untuk Penelitian. Bandung; Alfabeta.

Siagian SP (1982), Organisasi kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Bina Aksara, Jakarta.

Sulandra, I.M., dan Mudarya, I.N. (2018). Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa. Locus Majalah Ilmiah FISIP, 9(1), 28-38

Sinambela. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta; Bumi Aksara.

Wijaya, 1996, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU No. 5 Th 1979 (sebuah tinjauan), Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Dokumen

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa

C. Jurnal

E-Journal Ilmu Pemerintahan 3(3), 2015: 1448-1459 ISSN 0000-0000 , ejournal.ip.fisip-unmul.org © Copyright 2015

Volume 1 Nomor 2, Nopember 2019 ISSN Online: 2684-8236
Publisher: Fakultas Sospol Universitas Sulawesi Tenggara Indexed by:
Google Scholar E-Journal Homepage: <http://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sjps>.

Jurnal fakultas Ilmu administrasi Universitas Halu Oleo
Kendari. Volume 1 Nomor 2. 2012

e- jurnal fakultas sospol universitas Sulawesi tenggara volume 1.
Nomor 2. 2018

jurnal fakultas fisip UGM. Volume 1.Nomor 2. 2019

KUISSIONER PENELITIAN

1. Petunjuk Pengisian

- a. Tulislah identitas pada bagian yang telah disediakan di bawah ini
- b. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang dianggap sesuai
- c. Jawablah semua dalam daftar pernyataan di bawahini

II. Identitas Responden

No. responden :

Tingkat umur :

Jenis Kelamin :

Tingkat pendidikan :

Lama bekerja :

No.	Pernyataan	Predikat			
		SB	B	KB	TB
Pemberdayaan Pendidikan					
1.	Pemberian beasiswa bagi masyarakat yang membutuhkan				
2.	Pemberian dana bagi peningkatan keterampilan masyarakat				
3.	Pemberian dana bagi pembinaan masyarakat				
Pemberdayaan kesehatan					
1.	Membantu biaya ibu hamil				
2.	Pemberian giji bagi balita				
3.	Pemberian honor bagi tenaga kesehatan				
4.	Pemberian bantuan dana bagi fasilitas pengobatan				
Pemberdayaan ekonomi					
1.	Program kerjatani				
2.	Alokasikan dana untuk beli bibit sayur				
3.	Pemberian modal usaha ternak				
Pemberdayaan sosial budaya					
1.	Kembangkan tradisi budaya suku dani				
2.	Kreativitas masyarakat kampung sinarekowa budaya suku dani				
3.	Mempertahankan dan kembangkan symbol budaya suku dani				

DOKUMENTASI



Foto :Bersama aparatorkampung, sebelum sikuesioner, tahun 2022



Foto :Sedang mengisikuesioner, bersama aparatorkampungsinarekowa, tahun 2022



Foto :Saat isi kuesioner aparatur kampung, tahun 2022



Foto: Aparatur kampung sedang mengisi kuesioner, tahun 2022



Foto: Aparaturkampungsedangmengisi kuesioner, tahun 2022



Foto :bersama di depankantorkampungsinarekowa, tahun 2022

BIODATA PENULIS



MARIKE MATUAN, penulis merupakan putri ke dua dari dua bersaudara lahir pada tanggal 3 Februari 1976 di Wouma Kabupaten Jayawijaya.

Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Horodak Matuan dan Ibu Kowok Lagowan Pendidikan Sekolah SD YPPK Santo Stevanus Wouma pada tahun 1990, Pendidikan Sekolah SMP YPPK Santo Thomas Wamena pada tahun 1993, Pendidikan Sekolah PGRI Wamena pada tahun 1996 dan penulis melanjutkan Perguruan Tinggi di Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena.

